BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi merupakan bagian dari aspek ekonomi, dimana dalam hal ini kegiatan koperasi turut menjadi bagian agar tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya.¹ Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya.

Pada era globalisasi, koperasi masih menjadi pilihan yang terbaik bagi masyarakat dalam kegiatan pinjam meminjam maupun jual beli karena dianggap mudah dan ringan. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari kumpulan individu yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas.. Dalam rangka memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan koperasi di Indonesia.²

Koperasi tidak dapat dipisahkan dari diri Negara Indonesia. Hal ini ditandai dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas

¹ Camellia Fanny Sitepu dan Hasyim, 2018, “Perkembangan Ekonomi Koperasi Indonesia”, NIAGAWAN, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 60.

² *Ibid*, hlm. 60.

asas kekeluargaan. Undang-Undang tersebut menjadi landasan bagi Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi ekonomi.

Di Indonesia, pengaturan mengenai koperasi terdapat dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Disebutkan pada Pasal 1 ayat (1), definisi koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Kelembagaan koperasi di Indonesia merupakan bentuk dari perwujudan dari demokrasi ekonomi. Dengan adanya koperasi diharapkan masyarakat Indonesia bisa mencapai keadilan sosial melalui perekonomian. Namun, seiring dengan kemajuan zaman, sering terjadinya koperasi yang mengalami gagal bayar dan mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat jangkauan koperasi yang hampir mencakup seluruh lapisan masyarakat Indonesia.³

Perkara mengenai koperasi yang mengalami gagal bayar mengundang keprihatinan. Beberapa diantaranya pada Koperasi Sejahtera Bersama tahun 2020 dengan jumlah korbannya kurang lebih 186 orang. Kerugian yang dialami korban mencapai Rp 8.8 Triliun. Selanjutnya ditahun yang sama Koperasi Indosurya menjadi salah kasus gagal bayar dengan kerugian terbesar di Indonesia mencapai Rp 106

³ Salwa Faeha Hanim, 2023, "Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan", Jurnal Bisnis Hukum, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 91-92.

triliun.⁴ Koperasi ini menawarkan produk simpanan dengan iming-iming bunga 9-12% per tahun. Hal janggal dari koperasi ini, yaitu korban penipuan ini berstatus “nasabah” dan bukan anggota koperasi. Maka dari itu, mereka pun tidak membayar simpanan wajib dan pokok ke koperasi. Akibatnya, ketika gagal bayar terjadi, status korban jadi makin membingungkan.⁵ Maraknya kasus gagal bayar tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya karena lemahnya regulasi serta implementasi dari regulasi itu sendiri.

Mengenai pengawasan koperasi, Indonesia telah memiliki regulasi dalam memberikan perlindungan terhadap anggota koperasi. Bahkan pemerintah telah lebih dari lima kali menerbitkan dan mencabut aturan tentang koperasi baik berupa Undang-Undang, Peraturan Menteri serta aturan hukum turunan lainnya. Namun, jika dilihat dari faktanya, aturan yang ada dianggap masih belum optimal dalam memberikan kepastian hukum dari berbagai aspek baik pendirian, pengelolaan maupun pengawasan koperasi.⁶

Pengawasan merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu koperasi karena dengan pengawasan yang efektif, diharapkan penegakan hukum dalam sektor koperasi dapat berjalan dengan optimal.⁷ Pada Pasal

⁴ Aulia Akbar, “4 Penipuan Berkedok Koperasi Paling Heboh di Indonesia”. *Indonesia*, <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20221220110538-72-398438/4-penipuan-berkedok-koperasi-paling-heboh-di-indonesia>, dikunjungi pada 24 Oktober 2023 Jam 00.30 WIB

⁵ Aulia Akbar, “4 Penipuan Berkedok Koperasi Paling Heboh di Indonesia”. *Indonesia*, <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20221220110538-72-398438/4-penipuan-berkedok-koperasi-paling-heboh-di-indonesia>, dikunjungi pada 24 Oktober 2023 Jam 00.30 WIB

⁶ Salwa Faeha Hanim, 2023, “Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan”, *Jurnal Bisnis Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 92.

⁷ Antoni, Veri dan Azka Farrel Razaga, 2024, “Permasalahan Hukum Pada Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2024, hlm. 189

3 ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah No. 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi, dibahas mengenai lembaga yang berwenang untuk mengawasi koperasi, yang terdiri dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Namun, dalam peraturan menteri tersebut tidak dijelaskan mengenai batas-batas kewenangan dari ketiga pengawas koperasi tersebut sehingga sering kali terdapat ketidakpastian kewenangan diantara ketiga pengawas tersebut.⁸

Contoh lain mengenai lemahnya aspek pengawasan koperasi, antara lain dibuktikan pengelolaan koperasi yang tidak efektif dari segi manajemen koperasi.⁹ Di Indonesia masih terdapat banyak kasus mengenai pengurus koperasi yang menganggap sebuah koperasi sebagai tempat untuk berinvestasi dengan harapan mendapat keuntungan yang besar yang mana hal ini akan berimbas pada kasus gagal bayar.¹⁰

Pengawasan terhadap koperasi yang belum efektif, menyebabkan banyaknya terjadi kasus gagal bayar yang berujung pada rendahnya perlindungan bagi anggota koperasi. Untuk itu pada Januari 2023 pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU P2SK) dikarenakan rendahnya perlindungan konsumen disektor keuangan serta dalam rangka pengembangan dan penguatan sektor

⁸ *Ibid*, hlm. 188-189

⁹ Tamaheang, S.P., Ogotan, M., dan Plangiten, N, 2020, "Efektivitas Simpan Pinjam Koperasi Bagi Masyarakat Petani di Desa Mangaran Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud", *Jurnal Administrasi Publik, Indonesia*, 2020, vol. 5, no. 81, hlm. 4-5

¹⁰ Antoni, Veri dan Azka Farrel Razaga, 2024, "Permasalahan Hukum Pada Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1, 2024*, hlm. 189

keuangan melalui penataan kegiatan usaha simpan pinjam. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum melalui reformasi sektor keuangan Indonesia. UU P2SK ini mulai berlaku sejak 12 Januari 2023.

Diberlakukannya UU P2SK membagi koperasi menjadi dua, yaitu koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan yang melayani (menghimpun serta menyalurkan dana) diluar dari anggotanya (*open loop*) dan koperasi yang tidak bergerak di sektor jasa keuangan yang kegiatannya terbatas hanya melayani dari, oleh dan untuk anggotanya sendiri (*close loop*)¹¹. Dalam Pasal 44B ayat (2) UU P2SK dijelaskan mengenai kriteria dari koperasi *open loop*, kriterianya sebagai berikut : a) menghimpun dana dari pihak selain anggota koperasi yang bersangkutan; b) menghimpun dana dari anggota koperasi lain; c) menyalurkan pinjaman ke pihak selain anggota koperasi yang bersangkutan dan/atau menyalurkan pinjaman ke anggota koperasi lain; d) menerima sumber pendanaan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya melewati batas maksimal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan/atau e) melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam seperti usaha perbankan, usaha perasuransian, usaha program pensiun, pasar modal, usaha lembaga pembiayaan, dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai sektor jasa keuangan. Lain halnya dengan koperasi *close loop*, koperasi ini adalah koperasi simpan pinjam murni yang

¹¹ Savitri, Diffa Ayu Nindyatami. Et. All, 2023, “Peranan OJK Terhadap Pengawasan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam”. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 1

kegiatannya terbatas hanya melayani dari, oleh dan untuk anggotanya sendiri. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi ini dibatasi untuk menghimpun dan menyalurkan dana hanya melalui kegiatan usaha simpan pinjam kepada anggota koperasi atau koperasi lainnya. Pengaturan, perizinan, dan pengawasan terhadap koperasi *close loop* sepenuhnya di bawah tanggung jawab Kementerian Koperasi dan UKM.¹²

Pasca diundangkannya UU P2SK terjadi perubahan dalam hal kepengawasan koperasi yang sebelumnya diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Dimana koperasi yang tidak bergerak di sektor jasa keuangan (*close loop*) pengawasannya masih diatur UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasi oleh Kemetrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sedangkan koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan (*open loop*) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengawasan koperasi yang bersifat *open loop* ini diatur dalam Pasal 44B ayat (3) UU P2SK, yang berbunyi “Perizinan, Pengaturan, dan pengawasan koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Undang-Undang.”

Dalam ketentuan peralihan terkait koperasi sektor jasa keuangan pada UU P2SK disebutkan bahwasannya keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan koperasi sektor jasa akan berlaku secara efektif pada Januari 2025. Namun, wacana penerapan dari UU P2SK ini

¹² Meilanova, Denis Riantiza, “Pengawasan Koperasi Dirombak, Mengenal Beda Koperasi Open Loop dan Koperasi Close Loop” <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230223/12/1630914/pengawasan-koperasi-dirombak-mengenal-beda-koperasi-open-loop-close-loop>, dikunjungi pada 19 Juni 2024 Jam 16.12 WIB

menuai reaksi negatif dari asosiasi koperasi simpan pinjam, karena dianggap merusak jati diri koperasi yang selama ini menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong. UU P2SK dianggap bertentangan Pasal 5 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasi mengenai prinsip-prinsip koperasi, khususnya prinsip gotong royong dan ber-asaskan kekeluargaan yang merupakan prinsip dasar perekonomian di Indonesia yang ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Perbedaan pandangan ini membuat penulis tertarik meneliti lebih lanjut terkait implikasi dari penerapan UU P2SK serta pengawasan koperasi sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam masa transisi dalam bentuk skripsi dengan judul " IMPLIKASI HUKUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN TERHADAP KEGIATAN KOPERASI SEKTOR JASA KEUANGAN"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan konsep koperasi sebelum dan setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap perkoperasian di Indonesia?
2. Apa kendala dalam pengawasan koperasi sektor jasa keuangan dalam masa transisi oleh otoritas jasa keuangan?

3. Bagaimana implikasi dari penerapan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap koperasi?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perbandingan konsep koperasi sebelum dan setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap perkoperasian di Indonesia?
2. Untuk mengetahui kendala dalam pengawasan koperasi sektor jasa keuangan dalam masa transisi oleh otoritas jasa keuangan
3. Untuk mengetahui implikasi dari penerapan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap koperasi

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Manfaat secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman bagi penelitian berikutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Perdata Bisnis mengenai perkoperasian
 - b. Untuk menambah ilmu pengetahuan dalam mengimplementasikan teori-teori yang telah dipelajari

- c. Untuk menambah wawasan dan memperluas cakrawala penulis dalam bidang koperasi terutama koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan (*open loop*)

2) Manfaat secara praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada individu maupun masyarakat mengenai implikasi hukum berlakunya UU P2SK terhadap kegiatan koperasi sektor jasa keuangan

E. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian berasal dari “*Metode*” yang berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan “*Logos*” yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi menyebutkan bahwa, metode penelitian merupakan suatu langkah untuk melakukan sesuatu dengan pikiran secara saksama dalam rangka mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisa hingga menyusun laporan.¹³

Dalam penelitian ini guna memperoleh data yang konkrit, untuk mendapatkan hasil penelitian dalam menyelesaikan rumusan masalah

¹³ Ridha Rahmi Anum, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Tabung Gas Elpiji 3 KG di Kota Pariaman”, Disertasi Doktor Universitas Andalas, Padang, hlm. 9.

yang penulis teliti dan untuk dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka penulis metode yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam menyelesaikan permasalahan adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma tertulis, seperti peraturan perundang-undangan atau hukum yang menjadi pedoman perilaku masyarakat. Penelitian ini mengandalkan data sekunder, seperti analisis terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, serta pembuktian melalui pasal-pasal yang ada. Selain itu, penelitian hukum normatif juga dapat dipahami sebagai penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi asas-asas hukum, struktur hukum, keselarasan hukum, sejarah hukum, serta perbandingan antar sistem hukum.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud utama dari penelitian ini adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu untuk

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 49-51

memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka penyusunan teori baru.¹⁵

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dan juga dikumpulkan langsung dilapangan sebagai objek penelitian serta diperoleh dari responden berupa keterangan ataupun fakta-fakta.¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan di Kota Padang.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.¹⁷ Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber data penelitian yang digunakan penulis ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 10

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 12

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 12

Terdiri dari peraturan- peraturan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari :¹⁸

Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari :

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945

(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

Tentang Perkoperasian

(3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

(4) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang

Pengawasan Koperasi

(5) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang

Usaha Simpan Pinjam Koperasi

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁹ Bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, seperti

¹⁸ Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.

buku-buku, jurnal, artikel, makalah, dan skripsi yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di :

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa :

a. Studi dokumen

Dalam praktiknya, pengumpulan atau perolehan data dapat dilakukan melalui berbagai metode dan pendekatan yang sesuai

dengan jenis penelitian yang dilakukan. Studi dokumen merupakan langkah awal bagi setiap penelitian hukum baik penelitian normatif maupun penelitian empiris. Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi penulisan penelitian skripsi berupa bahan-bahan hukum, asas-asas, doktrin dan kaidah hukum yang didapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁰

b. Wawancara

Wawancara dilakukan guna memperoleh keterangan secara lisan untuk mencapai tujuan berupa mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur. Pada penelitian ini dilakukan wawancara dengan Bapak Ade dari Staff Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dan Ibu Irawati dan Bapak Rifki dari Analisis Senior Deputy Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis di Kantor otoritas jasa keuangan Kota Padang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data selanjutnya data diolah dengan menyesuaikan pada permasalahan yang diteliti dalam hal ini tentang implikasi hukum berlakunya UU P2SK

²⁰ Ishaq, 2017, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi", Alfabeta, Bandung, hlm. 115

terhadap kegiatan koperasi sektor jasa keuangan, kemudian akan dilakukan proses pengeditan agar data lebih mudah dipahami dan dapat disajikan.

Setelah data terkumpul penulis mengolah data dengan cara sebagai berikut:

1) *Editing*

Dalam penelitian ini semua data diolah dengan metode *editing* atau pemeriksaan. Metode *editing* yaitu pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian data untuk dapat diproses lebih lanjut guna menjamin data yang diperoleh apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan dengan kenyataan.

b. Analisis Data

Setelah proses pengolahan data selesai, tahap selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan analisis kualitatif yang dapat menghasilkan penyajian data deskriptif. Kemudian data yang telah terkumpul akan dievaluasi dengan bahan-bahan hukum terkait seperti peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, serta pihak terkait dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan.